

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA

Penulis:

Manur Sitinjak¹

manur.sitinjak@gmail.com

Yundi Hafizrianda²

harimanandalan@gmail.com

Meinarni Asnawi³

meinarni.asnawi@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to test and analyze the effect of Quality of HR, Technology Utilization and Exposure of Financial Reports for Accountability. The population of this discussion were all 68 respondents. Tests carried out on a sample of 68 respondents. The sample method used is the Census. Information collection is done by direct survey. Testing the hypothesis is tested empirically using Path Analysis. The results showed that the Quality of Human Resources, Use of Information Technology and Presentation of Financial Statements had a positive and significant influence on Accountability. This means that if the Quality of Human Resources increases or gets better, Accountability will also be better. The use of Information Technology has proven to have a positive but not significant effect on Accountability. Furthermore, the presentation of financial statements proved to have a positive and meaningful effect on accountability. This shows that the quality of human resources, utilization of information technology, exposure to financial reports and accountability in the BPS of the Papua Province has been going well.

Keywords: Quality of Human Resources, Information Technology, Financial Reports and Accountability

PENDAHULUAN

Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban instansi pemerintah telah dimulai sejak tahun 1998, dengan diterbitkannya TAP MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah mandat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Inpres tersebut menjelaskan bahwa masing-masing lembaga pemerintah sebagai unsur administrasi pemerintahan harus dapat bertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta mempertanggungjawabkan kewenangannya sebagai pengelola sumber daya yang didasarkan pada suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sementara itu, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran instansi yang bersangkutan,

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

² Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

³ Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNCEN

dibuatlah suatu sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang telah diperbarui dengan PMK No. 233/PMK.05/2011. Di Indonesia, sejak Januari 2001 masalah akuntabilitas publik sangat penting sejak implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sukhemi, (2010) Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, dan penegakan hukum.

Otonomi daerah berdampak pada berbagai aspek, baik aspek politik, hukum dan sosial, serta aspek akuntansi dan manajemen keuangan daerah. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah kemudian dilakukan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami secara luas dan entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat berisi informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di antara pembaca.

Untuk menghindari kesalahan, laporan keuangan harus dibuat catatan untuk laporan keuangan (CALK) yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Mengacu pada BPS sebagai Obyek penelitian tesis ini, sumber Daya Manusia pada BPS Provinsi Papua yang ada saat ini menuntut untuk mampu menyelesaikan kebutuhan dan penyajian laporan - laporan, baik BPS Provinsi Papua sendiri maupun 21 BPS Kabupaten/Kota dibawahnya.

Sementara itu, peran one man, one PC sebagai manifestasi dari reformasi birokrasi diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kebutuhan data dan penyajian laporan keuangan yang andal. Laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat membawa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan dimaksud dapat meningkat kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Pemenuhan tujuan dan laporan keuangan akan bermanfaat dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat

karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu : dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Informasi dapat dipahami bilamana pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan (Nazier,2006).

Darwin (2007) dalam Novita (2008) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi dalam laporan tahunan atau laporan terpisah mencerminkan tingkat akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Membuat laporan keuangan adalah bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat utama akuntabilitas dalam bentuk keterbukaan pemerintah terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi, khususnya informasi keuangan dan fiskal, harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo dan Tomasi, 1999) dalam Mardiasmo (2006). Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi (RB) BPS Provinsi Papua dituntut untuk mencapai 4 tujuan, yaitu: (a) Realisasi KKN BPS gratis; (b) Meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas BPS; (c) Meningkatkan kualitas data dan (d) Meningkatkan nada layanan publik.

Untuk mendukung area pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan tujuan meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas BPS melalui meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan negara. Akuntabilitas yang terukur di BPS Provinsi Papua sebagai tuntutan Reformasi Birokrasi, dalam penyajian laporan keuangan dibutuhkan kapasitas sumberdaya manusia yang memadai dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang sangat membantu dalam proses pengolahan data transaksi sehingga laporan keuangan disajikan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh *human eror*.

Berdasarkan uraian di atas, studi tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi dan Penyajian Laporan Keuangan pada Akuntabilitas Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dilakukan dengan menggunakan empat variabel, yaitu kualitas sumber daya manusia. (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) dan Penyajian Laporan Keuangan) dan Akuntabilitas (Y). Sedangkan tujuan yang diharapkan muncul dari penyelidikan ini adalah: (1) Menganalisis pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan teknologi informasi, Penyajian Laporan Keuangan pada Akuntabilitas BPS Provinsi Papua. Dwiyanto, (2005), mendefinisikan *Good governance* (organisasi yang

baik) akan membawa suatu negara untuk memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, tingkat korupsi akan menjadi lebih rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan masyarakat.

Zahara Djafar (2000) mengatakan bahwa jika kualitas sumber daya manusia tinggi, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan merasa bahwa manusia memiliki hubungan fungsional dengan sistem sosial, maka pengembangan dapat dilakukan dengan baik dan berorientasi ke depan.

Roach (1991) dan Strassman (1996) menawarkan bukti bahwa investasi dalam teknologi informasi membutuhkan dana besar dan akan meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam berinvestasi dalam teknologi informasi mengharuskan organisasi untuk menggunakan teknologi informasi secara optimal.

Teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mengelola informasi apa pun, termasuk kata-kata, angka, dan gambar (Oxford, 1995). Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan satu atau sejumlah tugas pemrosesan. data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi dan menampilkan data (Alter, 1992).

Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai aktualisasi akuntabilitas seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikendalikan, dalam rangka mencapai tujuan, melalui media dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja berkala. Sumber daya dalam hal ini adalah fasilitas pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi untuk membantu pelaksanaan tugas yang telah ditugaskan kepadanya.

Keputusan LAN No. 239 / IX / 6/8/2003 pedoman tentang untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja lembaga adalah aktualisasi dari kewajiban lembaga pemerintah untuk menjelaskan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai rekomendasi dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban berkala.

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai BPS Provinsi Papua sebanyak 68 Orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara keseluruhan (*Sensus*) yaitu kepada pihak yang memiliki kapabilitas sebagai (1) Pelaksana (staf) yang berjumlah 48 orang; (2) Kabid) Kepala seksi (Kasi) dan Kepala Subbagian (Kasub) yang berjumlah 20 orang.

2. Definisi Operasional

- a. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk menyampaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai.
- b. Manajer dan karyawan operasional harus dapat menggunakan aplikasi teknologi informasi yang tersedia, mempelajari secara langsung aspek perangkat keras dan perangkat lunak dan mengadopsi teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan tarif mereka.
- c. Laporan keuangan pemerintah adalah media akuntabilitas untuk memenuhi hak-hak publik yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.
- d. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah realisasi kewajiban lembaga pemerintah untuk menjelaskan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diselesaikan melalui sistem pertanggungjawaban berkala.

3. Analisa Jalur (*Path Analysis*)

Kegunaannya untuk mendeteksi hubungan struktural antara variabel eksogen (yang memengaruhi) pada variabel endogen (yang dipengaruhi) yang bertujuan untuk menentukan besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan total pengaruh variabel endogen pada variabel eksogen. Sementara itu, Robert D. Retherford (1993). Kemahiran ini digunakan untuk menguji jumlah kontribusi (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap lintasan diagram hubungan sebab akibat antara variabel X_1 , X_2 dan Z ke Y . Analisis jalur adalah teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi secara berganda. regresi jika variabel independen mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung.

PEMBAHASAN

1. Deskripsi Usia Responden

Usia responden dalam kajian ini terdiri dari 10 kelas dengan kelas pertama diisi dengan usia termuda yakni 24 tahun dan kelas terakhir diisi dengan usia tertua yakni 59 tahun. Gambaran karakteristik responden berdasarkan usia ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Kelas	Umur	Frekuensi	(%)
1	24 – 26	9	13.24
2	27 – 29	14	20.59
3	30 – 32	15	22.06
4	33 – 35	6	8.82
5	36 – 38	5	7.35
6	39 – 41	5	7.35
7	42 – 44	2	2.94
8	45 – 47	1	1.47
9	48 – 50	5	7.35
10	51 – 53	2	2.94
11	54 – 56	3	4.41
12	57 – 59	1	1.47
Jumlah		68	100

Sumber: data diolah, 2015

Tabel 1 tampak bahwa mayoritas responden mempunyai umur bervariasi namun yang paling dominan berada di kisaran umur 30 - 32 tahun sebanyak 15 responden atau 22.06%. Diikuti responden dengan usia 27 - 29 tahun sebanyak 14 responden atau 20.59%.

2. Deskripsi Pendidikan Responden

Berdasarkan hasil tabulasi data yang dilakukan sesuai latar belakang pendidikan responden, maka pengelompokan tingkat pendidikan terakhir responden terdiri dari; pendidikan SMA/SMK, D3, D4, S1 dan S2 seperti yang terlihat dibawah ini.

Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi	(%)
1.	SMA/SMK	14	20.59
2.	D3	4	5.88
3.	D4	21	30.88
4.	S1	16	23.53
5.	S2	13	19.12
Jumlah		68	100

Sumber: data diolah, 2015

Tabel 2 diatas tampak bahwa responden yang terbanyak adalah yang berpendidikan D4 adalah lulusan dari Sekolah kedinasan yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik dengan jumlah 21 orang

atau 30.88%, diikuti oleh kelompok responden yang berpendidikan S1 sebanyak 14 orang atau 20.59 %.

3. Deskripsi Jenis Kelamin

Hasil tabulasi data melalui distribusi frekuensi yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin responden, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	(%)
1.	Laki-laki	43	63.24
2.	Perempuan	25	36.76
Jumlah		68	100

Sumber: data diolah, 2015

Data diatas menggambarkan bahwa dari 68 orang yang diambil sebagai responden terdapat responden laki-laki sebanyak 43 orang atau sebesar 63.24% dan 24 orang (36.76%) adalah perempuan.

4. Deskripsi Pekerjaan Responden

Berdasarkan hasil tabulasi data yang dilakukan sesuai latar belakang Bidang/Bagian, maka pengelompokan Bidang Sosial, IPDS, Distribusi, Neraca, Produksi Bagian Tata Usaha seperti yang terlihat dibawah ini.

Tabel 4 Distribusi Responden Berdasarkan Bidang/Bagian

No.	Bidang/Bagian	Frekuensi	(%)
1.	Sosial	8	11.76
2.	IPDS	20	29.00
3.	Distribusi	8	11.76
4.	Neraca	7	10.00
5.	Produksi	4	6.48
7.	Tata Usaha	21	31.00
Jumlah		68	100

Sumber: data diolah, 2015

Tabel 4 diatas tampak bahwa responden yang terbanyak adalah Pada bagian tata Usaha dengan jumlah 21 orang atau 31.00%, diikuti oleh kelompok responden pada Bidang IPDS sebanyak 20 orang atau 29.00 %.

5. Distribusi Jawaban Responden

Analisis ini bersifat memberikan makna secara deskriptif dan kecenderungan yang muncul mengenai variabel penelitian sesuai dengan hasil dari data tanpa menarik suatu kesimpulan akan

didasarkan pada nilai rata-rata skor jawaban. Distribusi kategori tanggapan responden untuk masing-masing variabel akan dijelaskan dibawah ini.

a. Persepsi Tentang Kualitas SDM

Hasil penelitian melalui pengujian statistik deskriptif diperoleh informasi yang jelas mengenai persepsi responden terhadap Kualitas SDM (X_1) dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata seperti yang disajikan pada berikut:

Tabel 5 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kualitas SDM

Item	Skor Jawaban Responden												Mean
	STS		TS		N		S		SS		Total		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X _{1.1}	4	5.9	5	7.4	10	14.7	35	51.5	11	16.2	68	100	3.69
X _{1.2}	1	1.5	5	7.4	18	26.5	35	51.5	9	13.2	68	100	3.68
X _{1.3}	1	1.5	-	-	5	7.4	25	36.8	37	54.4	68	100	4.43
X _{1.4}	1	1.5	-	-	11	16.2	48	70.6	8	11.8	68	100	3.91
X _{1.5}	1	1.5	3	4.4	10	14.7	42	61.8	12	17.6	68	100	3.90
X _{1.6}	1	1.5	3	4.4	11	16.2	39	57.4	14	20.6	68	100	3.91
X _{1.7}	1	1.5	1	1.5	11	16.2	38	55.9	17	25	68	100	4.01
X _{1.8}	1	1.5	1	1.5	10	14.7	44	64.7	12	17.6	68	100	3.96
Mean Kualitas SDM ;												3.93	

Sumber: data diolah, 2015.

Tabel diatas menyajikan data jawaban persepsi responden tentang Kualitas SDM yang terjabarkan melalui 8 pernyataan dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 3.93. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa dukungan Kualitas SDM akan berdampak pada Pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada, Penyajian Laporan Keuangan dan Akuntabilitas di Badan Pusat Statistik (BPS) Papua.

Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya adalah item ke 3 yang menjelaskan bahwa “pelatihan-pelatihan perlu dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.43.

b. Persepsi Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil penelitian melalui pengujian statistik deskriptif diperoleh informasi yang jelas mengenai persepsi responden terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata seperti yang disajikan pada berikut ini;

Tabel 6 Distribusi Jawaban Responden Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi

Item	Skor Jawaban Responden												Mean
	STS		TS		N		S		SS		Total		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X _{2.1}	2	2.9	2	2.9	9	13.2	35	51.5	20	29.4	68	100	4.01
X _{2.2}	4	5.9	2	2.9	7	10.3	35	51.5	20	29.4	68	100	3.96
X _{2.3}	1	1.5	3	4.4	11	16.2	40	58.8	13	19.1	68	100	3.90
X _{2.4}	1	1.5	-	-	17	25	40	58.8	10	14.7	68	100	3.85
X _{2.5}	1	1.5	1	1.5	13	19.1	48	70.6	5	7.4	68	100	3.81
X _{2.6}	1	1.5	1	1.5	10	14.7	40	58.8	16	23.5	68	100	4.01
Mean Pemanfaatan Teknologi Informasi ;													3.92

Sumber: data diolah, 2015.

Tabel diatas menyajikan data jawaban persepsi responden tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terjabarkan melalui 6 pernyataan dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 3.92. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa dukungan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan berdampak pada Penyajian Laporan Keuangan dan Akuntabilitas di Badan Pusat Statistik (BPS) Papua.

Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya adalah item pertama dan yang ke enam yang menyatakan bahwa “memiliki komputer yang cukup adalah penting untuk tugas operasional pekerjaan dan menggunakan aplikasi; SPM, SAKPA dan SILABI pada tahapan transaksi keuangan” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.01.

c. Persepsi Tentang Penyajian Laporan Keuangan

Hasil penelitian melalui pengujian statistik deskriptif diperoleh informasi yang jelas mengenai persepsi responden terhadap Penyajian Laporan Keuangan (Z) dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata seperti yang disajikan pada berikut ini;

Tabel 7 Distribusi Jawaban Responden Tentang Penyajian Laporan Keuangan

Item	Skor Jawaban Responden												Mean
	STS		TS		N		S		SS		Total		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Z _{1.1}	1	1.5	1	1.5	17	25	42	61.8	7	10.3	68	100	3.78
Z _{1.2}	1	1.5	-	-	18	26.5	42	61.8	7	10.3	68	100	3.79
Z _{1.3}	1	1.5	-	-	15	22.1	42	61.8	10	14.7	68	100	3.88
Z _{1.4}	1	1.5	1	1.5	20	29.4	37	54.4	9	13.2	68	100	3.76
Z _{1.5}	1	1.5	-	-	12	17.6	41	60.3	14	20.6	68	100	3.99
Z _{1.6}	1	1.5	-	-	10	14.7	39	57.4	18	26.5	68	100	4.07
Z _{1.7}	1	1.5	1	1.5	7	10.3	41	60.3	18	26.5	68	100	4.09
Z _{1.8}	1	1.5	-	-	7	10.3	51	75	9	13.2	68	100	3.99
Z _{1.9}	1	1.5	1	1.5	8	11.8	42	61.8	16	23.5	68	100	4.04
Mean Penyajian Laporan Keuangan ;													3.93

Sumber: data diolah, 2015.

Tabel diatas menyajikan data jawaban persepsi responden tentang Penyajian Laporan Keuangan yang terjabarkan melalui 9 item pernyataan dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 3.93. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa dukungan Penyajian Laporan Keuangan akan berdampak pada Akuntabilitas di Badan Pusat Statistik (BPS) Papua.

Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya adalah item ke 6 dan ke 7 yang menyatakan bahwa “catatan akuntansi/buku kas umum (BKU) dijaga untuk tetap *up to date* dan rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi, catatan bank dan catatan pihak eksternal (KPPN) yang membutuhkan konfirmasi” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.07 dan 4.09.

d. Persepsi Tentang Akuntabilitas

Hasil penelitian melalui pengujian statistik deskriptif diperoleh informasi yang jelas mengenai persepsi responden terhadap Akuntabilitas (Y) dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata seperti yang disajikan pada berikut ini;

Tabel 8 Distribusi Jawaban Responden Tentang Akuntabilitas

Item	Skor Jawaban Responden												Mean
	STS		TS		N		S		SS		Total		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y _{1.1}	1	1.5	-	-	14	20.6	37	54.4	16	23.5	68	100	4.00
Y _{1.2}	-	-	2	2.9	8	11.8	33	48.5	25	36.8	68	100	4.19
Y _{1.3}	2	2.9	-	-	8	11.8	48	70.6	10	14.7	68	100	3.94
Y _{1.4}	-	-	1	1.5	8	11.8	37	54.4	22	32.4	68	100	4.18
Y _{1.5}	-	-	-	-	6	8.8	42	61.8	20	29.4	68	100	4.21
Y _{1.6}	1	1.5	1	1.5	5	7.4	44	64.7	17	25	68	100	4.10
Y _{1.7}	-	-	2	2.9	14	20.6	43	63.2	9	13.2	68	100	3.87
Y _{1.8}	-	-	1	1.5	12	17.6	41	60.3	14	20.6	68	100	4.00
Y _{1.9}	1	1.5	-	-	11	16.2	38	55.9	18	26.5	68	100	4.06
Mean Akuntabilitas;													4.06

Sumber: data diolah, 2015.

Tabel diatas menyajikan data jawaban persepsi responden tentang Akuntabilitas yang terjabarkan melalui 9 item pernyataan dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.06. Hal ini berarti responden cenderung sangat setuju dengan seluruh pernyataan tentang Akuntabilitas di Badan Pusat Statistik (BPS) Papua.

Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya adalah item ke 5 dan ke 2 yang menyatakan bahwa “pelayanan publik

yang cepat dan cermat dan pemanfaatan anggaran yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.21 dan 4.19.

2. Hasil Pembahasan Pengaruh Langsung

a. Pengaruh Langsung Kualitas SDM terhadap Pemanfaatan Teknologi

Variabel Kualitas SDM dalam kajian ini terjabarkan dalam 8 pernyataan. Hasil pengujian hipotesis pertama mengungkapkan bahwa Kualitas SDM (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 16.401 yang adalah lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($16.401 > 1.667$) dengan koefisien sebesar 0.896 yang berarti bahwa, terima H_a dan tolak H_0 atau hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi BPS Provinsi Papua.

Temuan persamaan pertama ini diperkuat oleh hasil analisis deskriptif yakni distribusi jawaban responden tentang Kualitas SDM yang memiliki nilai rata-rata sebesar 3.93. Makna nilai ini yaitu bahwa responden cenderung setuju bahwa dukungan Kualitas SDM akan berdampak pada Penggunaan Teknologi Informasi yang ada, Presentasi Laporan Keuangan dan Akuntabilitas di Badan Pusat Statistik (BPS) Papua.

Hasil analisis deskriptif juga mengungkapkan bahwa variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya adalah item ke 3 yang menyatakan bahwa “pelatihan-pelatihan perlu dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.43. Hasil ini sama dengan hasil penelitian Arina Roshanti 2014.

b. Pengaruh Langsung Kualitas SDM terhadap Penyajian Laporan Keuangan

Hasil analisis menyangkut pengaruh langsung Kualitas SDM lainnya adalah terhadap Penyajian Laporan Keuangan. Hasil pengujian mengungkapkan bahwa Kualitas SDM memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4.844 yang adalah lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($4.844 > 1.667$) dengan koefisien sebesar 0.492 yang berarti bahwa, terima H_a dan tolak H_0 atau hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan

Keuangan BPS Provinsi Papua. Hasil ini sama dengan hasil penelitian Arina Roshanti 2014 bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

c. Pengaruh Langsung Kualitas SDM terhadap Akuntabilitas

Analisis pengaruh langsung terakhir dari Kualitas SDM adalah terhadap Akuntabilitas BPS Provinsi Papua. Hasil pengujian mengungkapkan bahwa Kualitas SDM memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2.733 yang adalah lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($2.733 > 1.667$) dengan koefisien sebesar 0.314 yang berarti bahwa, terima H_a dan tolak H_0 atau hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas BPS Provinsi Papua.

d. Pengaruh Langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penyajian Laporan Keuangan

Variabel terteliti kedua adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dalam kajian ini terwakili melalui 6 pernyataan dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 3.92. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa dukungan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan berdampak pada Penyajian Laporan Keuangan dan Akuntabilitas di Badan Pusat Statistik (BPS) Papua. Hasil ini didukung oleh hasil analisis inferensial dengan menggunakan analisis regresi yang menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4.583 yang adalah lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($4.583 > 1.667$) dengan koefisien sebesar 0.465 yang berarti bahwa, terima H_a dan tolak H_0 atau hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian laporan Keuangan BPS Provinsi Papua.

Penjelasan lain dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya adalah item pertama dan yang ke enam yang menyatakan bahwa "memiliki komputer yang cukup adalah penting untuk tugas operasional pekerjaan dan menggunakan aplikasi; SPM, SAKPA dan SILABI pada tahapan transaksi keuangan" dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.01.

Hasil ini sama dengan hasil penelitian Zuliarti (2012) bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah daerah.

e. Pengaruh Langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas

Hasil analisis menyangkut pengaruh langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi lainnya adalah terhadap Akuntabilitas BPS Provinsi Papua. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1.916 yang adalah lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($1.916 > 1.667$) dengan koefisien sebesar 0.217 yang berarti bahwa, terima H_a dan tolak H_0 atau hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas BPS Provinsi Papua.

f. Pengaruh Langsung Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas

Pengaruh langsung yang terakhir dalam kajian ini adalah dari Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas BPS Provinsi Papua. Variabel Penyajian Laporan Keuangan dalam penelitian ini terwakili oleh 9 pernyataan yang berdasarkan analisis deskriptif memiliki mean atau nilai rata-rata sebesar sebesar 3.93. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa dukungan Penyajian Laporan Keuangan akan berdampak pada Akuntabilitas di Badan Pusat Statistik (BPS) Papua.

Hasil ini didukung oleh hasil pengujian hipotesa yang menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3.631 yang adalah lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($3.631 > 1.667$) dengan koefisien sebesar 0.436 yang berarti bahwa, terima H_a dan tolak H_0 atau hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas BPS Provinsi Papua. Hasil lain dari analisis deskriptif juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya adalah item ke 6 dan ke 7 yang menyatakan bahwa "catatan akuntansi/buku kas umum (BKU) dijaga untuk tetap *up to date* dan rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi, catatan bank dan catatan pihak eksternal (KPPN) yang membutuhkan konfirmasi" dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.07 dan 4.09.

Hasil ini sama dengan hasil penelitian Ni Made Suratmi, Nyoman Trisna Heriawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) bahwa Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik.

3. Hasil Pembahasan Pengaruh Tidak Langsung

a. Pengaruh Tidak Langsung Kualitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Informasi terhadap Akuntabilitas melalui atau dengan Mediasi Penyajian Laporan Keuangan

Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pengaruh Kualitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas melalui atau dengan mediasi Penyajian Laporan Keuangan BPS Provinsi Papua. Namun pengaruh mediasi tersebut bukan merupakan pengaruh yang dominan yang penjelasannya dibawah ini.

Hal ini dibuktikan dari hasil perkalian antara koefisien jalur Kualitas SDM terhadap Akuntabilitas (0.314), hasil perkalian koefisien jalur Kualitas SDM terhadap Penyajian Laporan Keuangan (0.492) dan hasil perkalian koefisien jalur Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas (0.436) atau ringkasnya, $0.314 \times 0.492 \times 0.436 = 0.067$. Jika hasil tersebut dibandingkan antara koefisien jalur langsung Kualitas SDM terhadap Akuntabilitas yang sebesar 0.314, maka besarnya koefisien jalur tidak langsung tadi adalah lebih kecil ($0.067 < 0.314$). Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh Kualitas SDM terhadap Akuntabilitas melalui Penyajian Laporan Keuangan bukanlah pengaruh yang dominan.

b. Pengaruh Tidak Langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi Informasi terhadap Akuntabilitas melalui atau dengan Mediasi Penyajian Laporan Keuangan

Temuan yang sama juga terjadi pada besaran pengaruh tidak langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas melalui Penyajian Laporan Keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya koefisien jalur langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas (0.217) adalah lebih besar dibandingkan besarnya koefisien jalur tidak langsung (0.044) melalui Penyajian Laporan Keuangan ($0.217 > 0.044$).

Berdasarkan temuan pada kedua jalur tidak langsung tersebut, maka sekali lagi dapat dikatakan bahwa pengaruh tidak langsung dari kedua jalur diatas bukanlah pengaruh yang dominan karena besarnya lebih kecil dibandingkn jalur langsungnya. Hal ini berarti bahwa tanpa

dimediasi oleh Penyajian Laporan Keuangan, Kualitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tetap akan mempengaruhi Akuntabilitas BPS Provinsi Papua secara positif dan signifikan.

KESIMPULAN

Kualitas SDM terbukti memberikan efek positif dan signifikan terhadap Penggunaan Teknologi Informasi atau dapat dikatakan bahwa dorongan untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia akan meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Provinsi Papua.

Kualitas SDM terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan atau dapat dikatakan bahwa dorongan untuk meningkatkan Kualitas SDM akan meningkatkan Penyajian Laporan Keuangan Provinsi BPS Provinsi Papua.

Kualitas SDM terbukti memberikan efek positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas atau dapat dikatakan bahwa dorongan untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia akan meningkatkan Akuntabilitas BPS di Provinsi Papua.

Pemanfaatan Teknologi Informasi telah berusaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan atau dapat dikatakan bahwa dorongan untuk meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan meningkatkan Penyajian Laporan Keuangan BPS Provinsi.

Penggunaan Teknologi Informasi telah berusaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas atau dapat dikatakan bahwa dorongan untuk meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan meningkatkan Akuntabilitas BPS Provinsi Papua.

Penyajian Laporan Keuangan BPS terbukti menopang pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas atau dapat dikatakan bahwa peningkatan dorongan Penyajian Laporan Keuangan akan meningkatkan Akuntabilitas Provinsi BPS Papua.

Tidak ada pengaruh dominan dari hasil pengujian pengaruh tidak langsung Kualitas SDM terhadap Akuntabilitas melalui Penyajian Laporan Keuangan Provinsi BPS Papua.

Tidak ada pengaruh dominan dari hasil pengujian pengaruh tidak langsung dari Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas melalui Penyajian Laporan Keuangan BPS Provinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosdirdjo, Prajudi, S. 1987. *Administrasi Dan Manajemen Umum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Widjadja (1998)
- Bastian Indra, (2014), *Sistim Pengendalian Manajemen Sektor Publik*, Salemba Empat.
- Ferdinand, Augusty, (2006) *Metode Penelitian Manajemen: Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Freeman Stoner dan Gilbert, (1995) *Management*, Prentice Hall International Company, London.
- Fuad Mas'ud, (2004) *Survai Diagnosisi Organisasional konsep dan aplikasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- George Terry dan Rue, Leslie W., (2001) *Dasar- Dasar Manajemen*. Alih Bahasa: G.A. Ticoalu, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ghozali, Imam, (2011) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5, Cetakan V, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta. Menurut Bastian, (2001)
- Handyaningrat, Soewarno. 1986. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV Haji Masagung. Jakarta.
- Herry Zudianto, (2004) *Permasalahan Implementasi indicator Kinerja di Kota Yogyakarta*, UAD Press, Yogyakarta.
- Komarudin. 1994. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. (2002)
- Lembaga Administrasi Negara, (1997) *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nawawi, (2002) *Pengawasan Intern*, Alfabeta, Bandung.
- Novita TH Ria Liza, (2014) *Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Nurcholis. 2007. *Audit Sektor Publik*. Bumi Aksara: Jakarta. Halim (2000).
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, (1999) *Metode Penelitian Survey*. LP3ES, Jakarta.
- Santoyo Gondodiyoto, (2009) *Pengelolaan Fungsi Audit Sistem Informasi*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sarwono, Jonathan, (2007) *Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Dengan SPSS*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Situmorang Victor M. dan Jusuf Juhir, (1994) *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Sulistiyani Ambar Teguh dan Rosidah (2003), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Edisi Pertama Graha Ilmu. Jakarta.
- Suratmi ni made, Suratmi, Nyoman Trisna Jheriawati, Nyoman Ari Surya Darmawan, (2014) *Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan dan Akseibilitas Laporan Keuangan terhadap*

Akuntabilitas Sektor Publik, Sripsi, Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Taliziduhu Ndraha, (2003) *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*, Rineka Cipta, Jakarta.

Trisnawati Sule Erni dan Kurniawan Saefullah, (2005) *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta.

Tuasikal Askam, (2006) *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit SKPD (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku)*.

Widanarto Agustinus, (2012) *Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012.

Yulianto, (1999) *Korupsi, Pengawasan Keuangan Negara dan Format Politik*, <http://ekojulianto.tripod.com>.

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang *Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah*.

Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang *Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.